

Pengaruh Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal

The effect of information asymmetry and compensation suitability on fraud tendencies moderated by internal control systems

Qohar Dwi Nugroho¹, Hariman Bone²

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: hariman.bone@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan Dana Desa serta dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 340 responden aparatur desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan aplikasi SmartPLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan untuk kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Abstract

This study aims to test the effect of information asymmetry and compensation suitability on the tendency of fraud in Village Fund management and is moderated by the internal control system. This type of research is quantitative using primary data and measured using a Likert scale. The number of samples used in this study was 340 village apparatus respondents in Kutai Kartanegara Regency. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS version 4 application. The results of this study indicate that information asymmetry has a positive and significant effect on the tendency of fraud, while compensation suitability does not have a negative and insignificant effect on the tendency of fraud. The internal control system is able to moderate the influence of information asymmetry on the tendency of fraud, whereas for compensation suitability, the internal control system is not able to moderate the influence of compensation suitability on the tendency of fraud.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Qohar Dwi Nugroho, Hariman Bone.

Article history

Received 2025-01-16

Accepted 2025-02-05

Published 2025-02-25

Kata kunci

Dana Desa;
Asimetri Informasi;
Kesesuaian
Kompensasi;
Kecenderungan
Kecurangan;
Sistem Pengendalian
Internal.

Keywords

Village Fund;
Information Asymmetry;
Compensation
Suitability;
Fraud Tendency;
Internal Control System.

1. Pendahuluan

Desa ialah sekumpulan permukiman masyarakat yang memiliki kesatuan hukum, kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya. Sebelumnya pemerintah menganggap desa sebagai objek pembangunan, namun saat ini, pemerintah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan negara (Rosifa & Supriatna, 2022). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan bantuan keuangan ke tiap-tiap desa melalui Dana Desa yang mulai berjalan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang (Rosifa & Supriatna, 2022). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2024) jumlah Dana Desa yang disalurkan sampai dengan Oktober 2023 mencapai Rp 54,71 triliun atau sebesar 78,2% dari jumlah yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 70 triliun. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023), Dana Desa termasuk salah satu akun yang sering dikorupsi oleh pemerintah desa. Kasus kecurangan Dana Desa sebagian besar berkaitan dengan kecurangan akuntansi atau kecurangan pelaporan akuntansi (Safitri et al., 2023).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ICW (2023), kasus korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan Dana Desa pada tahun 2022 menempati peringkat pertama dibanding dengan sektor yang lain dengan jumlah kasus sebanyak 155 kasus. ICW (2023) juga melaporkan kasus korupsi Dana Desa dari tahun 2016 - 2022 terdapat setidaknya terdapat 682 kasus dengan melibatkan sebanyak 959 aparatur desa. Dari kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 770,5 miliar. Meningkatnya kasus korupsi di sektor desa merupakan hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan harus dievaluasi. Hal ini dikarenakan, desa yang diyakini sebagai subjek pembangunan pemerintah tetapi berubah sebagai ladang korupsi (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah terbesar dan desa terbanyak serta memperoleh Dana Desa terbesar di Kalimantan Timur. Dana Desa yang diterima Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2017 - 2023 berdasarkan data dari Kemenkeu (2024) mencapai 1.239,59 miliar. Dana Desa yang disalurkan ini hampir 22% dari keseluruhan Dana Desa di Kalimantan Timur sebesar 5.647,02.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan kecurangan pengelolaan Dana Desa adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sambera Baru di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023. Kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sambera Baru adalah memalsukan dokumen, *mark up* harga, dan membuat stempel palsu. Atas tindakan ini PJ Kepala Desa Sambera Baru berhasil menyelewengkan Anggaran Dana Desa (ADD) senilai lebih dari Rp 1 Miliar (Rifki, 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecenderungan kecurangan disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal tersebut meliputi, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi serta keefektifan pengendalian internal (Samanto & Setyaningsih, 2020). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh F. S. Sari & Kamayanti, (2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan semua variabel kecuali variabel moralitas individu. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah, pertama variabel efektivitas pengendalian internal diganti sebagai variabel sistem pengendalian internal dan tidak dijadikan sebagai variabel eksogen, melainkan sebagai variabel moderasi.

2. Metode

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi, kaur dan staf desa. Alasan memilih aparatur desa karena sistem pemerintahan dikelola oleh aparatur desa. Selain itu, aparatur desa mengelola Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan desa. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah desa yang dijadikan sampel yaitu 100 desa dengan jumlah responden sebanyak 340 responden. Metode penyebaran data yaitu secara *offline* dan *online* yaitu dengan menyebarkan link *google form* melalui *whatsapp*.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hasil Analisis Data

3.1.1. Uji Validitas Konvergen

Untuk melakukan uji validitas konvergen, syarat yang harus dipenuhi adalah tiap-tiap konstruk yang termuat didalam kuesioner harus memiliki nilai *loading* >0,70. Namun, nilai *loading* >0,40 sampai dengan <0,70 bisa dipertimbangkan dengan syarat nilai AVE tiap variabel >0,50. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan validitas konvergen:

Tabel 1. Factor Loadings

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Asimetri Informasi	X _{1.1}	0,851	Valid
	X _{1.2}	0,961	Valid
	X _{1.3}	0,888	Valid
	X _{1.4}	0,810	Valid
Kesesuaian Kompensasi	X _{2.1}	0,945	Valid
	X _{2.2}	0,952	Valid
	X _{2.3}	0,709	Valid
Kecenderungan Kecurangan	Y ₁	0,739	Valid
	Y ₂	0,793	Valid
	Y ₃	0,858	Valid
	Y ₄	0,836	Valid
Sistem Pengendalian Internal	Z ₁	0,814	Valid
	Z ₂	0,707	Valid
	Z ₃	0,794	Valid
	Z ₄	0,803	Valid

Dari pengujian validitas konvergen yang ditunjukkan pada tabel 2. dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan pada penelitian ini layak untuk digunakan atau secara pengujian instrumen tersebut valid karena memiliki nilai >0,70. Pengujian validitas konvergen juga dapat dilihat pada nilai AVE dengan syarat nilai AVE tiap-tiap instrumen harus diatas 0,50. Nilai AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Asimetri Informasi (X ₁)	0,773	Valid
Kesesuaian Kompensasi (X ₂)	0,767	Valid
Kecenderungan Kecurangan (Y)	0,653	Valid
Sistem Pengendalian Internal (Z)	0,610	Valid

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan pada penelitian ini layak untuk digunakan karena memiliki nilai AVE >0,50. Dengan demikian pengujian validitas konvergen pada penelitian ini dapat terpenuhi.

3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpha* dari masing-masing variabel. Syarat untuk memenuhi pengujian ini adalah nilai *composite reliability* harus bernilai >0,70 dan nilai *cronbach alpha* harus bernilai >0,60. Dalam penelitian ini nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpha* tabel berikut:

Tabel 3. Composite Reliability & Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Asimetri Informasi	0,931	0,773	Reliabel
Kesesuaian Kompensasi	0,907	0,767	Reliabel
Kecenderungan Kecurangan Akutansi	0,882	0,763	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,862	0,610	Reliabel

Dari tabel diatas Dapat disimpulkan bahwa nilai composite reliability dari tiap-tiap variabel $>0,70$, dan nilai Cronbach alpha dari tiap-tiap variabel $>0,60$. Dengan demikian pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat terpenuhi.

Tabel 4. *R-Square*

Keterangan	<i>R-Square</i>
Kecenderungan Kecurangan	0,317

Dari tabel diatas menunjukkan nilai R-Square variabel kecenderungan kecurangan sebesar 0,317. Nilai R-Square 0,317 menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh model variabel eksogen dalam model penelitian ini sebesar 31,7%, sedangkan sisanya sebesar 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Tabel 5. *F-Square*

Keterangan	<i>F-Square</i>
Asimetri Informasi (X_1)	0,027
Kesesuaian Kompensasi (X_2)	0,000
Sistem Pengendalian Internal x Asimetri Informasi	0,018
Sistem Pengendalian Internal x Kesesuaian Kompensasi	0,000

Dari tabel diatas menunjukkan besaran pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Untuk variabel asimetri informasi menunjukkan nilai F-Square sebesar 0,027 yang artinya adalah variabel asimetri informasi memiliki pengaruh sedang/kuat terhadap variabel endogen karena memiliki nilai lebih F-Square diatas 0,15. Untuk variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan nilai F-Square sebesar 0,000 yang artinya adalah variabel kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap variabel endogen. Untuk variabel moderasi sistem pengendalian internal x asimetri informasi menunjukkan nilai F-Square sebesar 0,018 yang artinya variabel pengendalian internal memiliki pengaruh sedang atau kuat dalam memoderasi asimetri informasi terhadap variabel endogen. Sedangkan untuk variabel moderasi sistem pengendalian internal x kesesuaian kompensasi menunjukkan nilai F-Square sebesar 0,000 yang artinya variabel pengendalian internal tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap variabel endogen.

3.1.3. Pengujian Hipotesis

Tabel 6. *Bootstrapping*

Keterangan	<i>Original Sample (O)</i>	<i>P Value</i>
$X_1 \rightarrow Y$	0,148	0,018
$X_2 \rightarrow Y$	-0,014	0,416
$Z \rightarrow Y$	-0,541	0,000
$Z \times X_1 \rightarrow Y$	-0,121	0,025
$Z \times X_2 \rightarrow Y$	0,005	0,462

Berdasarkan hasil *bootstrapping* pada tabel diatas hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai *path coefficient* (0,148) positif dan *p-value* ($0,018 < 0,050$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) **didukung**.
- 2) Hipotesis kedua (H_2) menunjukkan nilai *path coefficient* (0,014) negatif dan *p-value* ($0,416 > 0,050$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) **tidak didukung**.
- 3) Hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan nilai *path coefficient* (0,121) negatif dan *p-value* (0,025). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi

(memperlemah) hubungan antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan dan signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) **didukung**.

- 4) Hipotesis keempat (H₄) menunjukkan nilai *path coefficient* (0,005) negatif dan *p-value* (0,462). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan dan tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H₄) **tidak didukung**.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini yang menyatakan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *path coefficient* (0,148) yang berarah positif dan *p-value* (0,018 < 0,050).

Asimetri informasi merupakan situasi ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara *principal* dengan *agent*. Dalam konteks desa asimetri informasi terjadi ketika pihak *agent* (pemerintah desa) selaku pengelola dana menggunakan dana tersebut dan tidak menyampaikan sepenuhnya penggunaan dana kepada pihak *principal* (masyarakat desa dan pemerintah pusat) sehingga *principal* tidak mengetahui detail penggunaan dana tersebut. Minimnya informasi pihak *principal* ini dapat dimanfaatkan oleh pihak *agent* dalam menyembunyikan informasi tertentu sehingga manipulasi kemungkinan dapat terjadi. Akibatnya Dana Desa tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sebagian besar Kantor Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (selaku *agent*) berupaya untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan informasi kepada Masyarakat (*principal*). Salah satu cara yang dilakukan oleh aparatur desa adalah dengan mempublikasi Laporan Realisasi APB Desa yang termuat ke dalam Infografik APB Desa dengan cara membuat spanduk. Selain mempublikasikan Laporan Realisasi APB Desa, bentuk transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa adalah apabila masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut, aparatur desa bersedia untuk menjelaskan kepada Masyarakat, selagi hal tersebut diperlukan. Bahkan, beberapa aparatur desa berpendapat apabila terdapat kantor desa yang tidak mau menjelaskan mengenai peruntukan Dana Desa (menutup-nutupi), berarti ada indikasi bahwa kantor desa tersebut melakukan tindakan curang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri *et al.*, (2023), Samanto & Setyaningsih, (2020), S. P. Sari *et al.*, (2022), Harsat *et al.*, (2023), dan Indah *et al.*, (2022), yang memperoleh hasil penelitian bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Adanya asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* akan memberikan peluang kepada *agent* untuk melakukan tindakan kecurangan demi dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semakin meningkatnya asimetri informasi, maka tingkat kecurangan akan meningkat, sebaliknya jika asimetri informasi turun, maka tingkat kecurangan juga akan turun.

3.2.2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini yang menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *path coefficient square* yang memperoleh nilai *path coefficient* (0,014) berarah negatif dan *p-value* (0,416 > 0,050)

Teori agensi Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa dengan kompensasi yang diberikan sesuai maka akan meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan. Namun, dalam penelitian ini, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini dikarenakan, adanya perbedaan pendapatan aparatur desa mengenai tingkatan kepuasan kesesuaian kompensasi. Aparatur desa berpendapat bahwa puas tidaknya kesesuaian kompensasi tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecenderungan kecurangan. Hal ini sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi mengenai penyalahgunaan dana desa, pelaku dari tindakan kecenderungan kecurangan mayoritas dilakukan oleh kepala desa dan pemerintah daerah (Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, gaji yang diterima oleh aparatur desa terkadang masih mengalami keterlambatan diawal tahun bahkan sampai dengan bulan Maret. Untuk di bulan selanjutnya yaitu di bulan Mei sampai dengan Desember, gaji yang diterima oleh aparatur desa sudah dibayarkan tepat waktu. Sedangkan untuk Tunjangan yang diterima oleh aparatur desa masih belum dibayarkan tepat waktu, hal ini dikarenakan tunjangan aparatur desa masih mengikut pencairan ADD yang diterima per 4 bulan sekali. Aparatur desa berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran gaji yang diterima tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kecenderungan kecurangan, karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar. Aparatur desa juga paham akan sanksi yang akan diterima apabila melakukan penyalahgunaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosifa & Supriatna, (2022), F. S. Sari & Kamayanti, (2021), Handi *et al.*, (2021), dan Indah *et al.*, (2022) yang berpendapat bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa akan menerima berapa pun besaran gaji yang diterima, karena pada dasarnya aparatur desa percaya dan yakin bahwa aparatur desa sebagai abdi negara, tidak berhak untuk mengeluh atas besaran gaji yang diterima. Ketidaksesuaian Kompensasi juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan seseorang untuk melakukan Tindakan kecenderungan kecurangan.

3.2.3. Sistem Pengendalian Internal Memoderasi (Memperlemah) Hubungan Antara Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini yang menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi (memperlemah) pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai path coefficient (0,121) berarah negatif dan p-value (0,025).

Teori agensi Jensen & Meckling, (1976) merupakan teori yang sering digunakan untuk membantu menjelaskan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika hanya pihak tertentu saja yang memahami secara detail informasi, yang dimaksud hal ini adalah pihak *agent* yang menyusun laporan keuangan dan hanya pihak *agent* saja yang mengetahui isi dan jumlah yang sebenarnya dari laporan keuangan tersebut. Kesenjangan ini dikarenakan kurangnya transparansi atau keterbukaan antara *agent* (pemerintah desa) dengan *principal* (masyarakat desa dan pemerintah pusat) untuk mendapatkan informasi tersebut. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya kecenderungan kecurangan. Jika sistem pengendalian internal dapat diterapkan dengan baik, maka pihak *agent* untuk melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan asimetri informasi karena terdapat sistem pengendalian internal yang baik.

Di Kantor Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sistem pengendalian internal sudah dirancang dengan sangat baik. Salah satunya adalah sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan tiap-tiap aparatur desa sudah memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga, tidak ada celah seseorang untuk melakukan tindakan curang, karena adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki. Selain itu juga, setiap ada pengeluaran diwajibkan untuk menyertakan bukti transaksi serta harus diotorisasi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran fiktif.

Di Kantor Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sebuah sistem yang langsung terintegrasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem tersebut bernama sistem keuangan Dana Desa (siskeudes) yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan sistem pencairan keuangan daerah (sipacarkuda) yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tujuan dari adanya sistem tersebut untuk membantu proses administrasi aparatur desa ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus berfungsi sebagai pemantauan atas kinerja yang dilakukan oleh aparatur desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aswad *et al.*, (2018), yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat memperlemah pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka dapat meminimalisir kesenjangan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* sehingga *agent* akan bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3.2.4. Sistem Pengendalian Internal Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini yang menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi (memperkuat) pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan tidak didukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai path coefficient (0,005) berarah positif dan p-value (0,462).

Teori Agensi Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi dapat meminimalisir tindakan kecenderungan kecurangan. Dengan kompensasi yang sesuai yang diberikan oleh manajer, diharapkan pegawai dapat bekerja sesuai dengan perintah dan kehendak manajer. Kompensasi yang sesuai merupakan bagian penting dan faktor utama dalam mencapai keberhasilan organisasi Suwarianti & Sumadi, (2020). Dengan demikian, pemberian kompensasi yang sesuai serta dibarengi dengan sistem pengendalian internal yang baik, maka manajemen tentunya akan bertindak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Di Kantor Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sistem pengendalian internal saat ini sudah dirancang dengan sangat baik dan selalu dievaluasi. Sebelumnya pemberian gaji kepada aparatur desa sering terlambat bahkan bisa sampai 6 bulan sekali baru cair, namun saat ini aparatur desa bisa memperoleh gaji tepat waktu setiap 1 bulan sekali. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada setiap awal tahun, aparatur desa bisa menerima gaji paling lambat di bulan Maret. Tetapi aparatur desa bersyukur atas perubahan mekanisme pembayaran gaji yang anggaran pembayaran gaji terpisah dari ADD sehingga pembayaran gaji aparatur desa bisa lebih efektif. Alasan sering terlambatnya pembayaran gaji pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pembayaran gaji aparatur desa digabung dengan pencairan ADD yang proses pencairannya per 4 bulan sekali.

Sebelumnya juga aparatur desa memperoleh gaji secara tunai yang mekanisme pembayaran dibayarkan melalui aparatur desa. Namun, mekanisme pembayaran gaji saat ini sudah tidak dibayar secara tunai, melainkan melalui sistem transfer. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama secara langsung dengan Bank BPD Kaltimara untuk membantu dalam proses penggajian aparatur desa. Dengan adanya mekanisme seperti ini dapat mencegah terjadinya pemotongan gaji oleh pihak ketiga, karena gaji diterima secara langsung ke tiap-tiap aparatur desa, Selain itu juga gaji yang diterima oleh aparatur desa sudah secara langsung dipotong pajak penghasilan, sehingga aparatur desa tidak perlu membayar pajak lagi atas penghasilan yang mereka peroleh.

Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal tidak mampu memperlemah pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini karena kesesuaian kompensasi tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk melakukan Tindakan kecenderungan kecurangan. Dengan demikian walaupun sistem pengendalian internal sudah baik tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap Tindakan kecenderungan kecurangan yang disebabkan karena ketidaksesuaian kompensasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Firnanda *et al.*, (2019) yang memperoleh hasil penelitian bahwa besar kecilnya kompensasi yang diterima serta sistem pengendalian internal yang efektif pada suatu organisasi, tidak akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang.

4. Simpulan

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap perilaku tindakan kecurangan oleh aparatur desa yaitu asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi serta dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Teori yang digunakan untuk membantu menjelaskan keterkaitan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Objek pada penelitian ini adalah aparatur desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 340 responden. Berdasarkan hasil uji hipotesis, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya sistem pengendalian internal mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan

untuk variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dikelola dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan aparatur desa sudah menyampaikan informasi mengenai laporan APBDes kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dana desa. Namun masih terdapat beberapa desa yang tidak menyampaikan laporan APBDes. Jika hal ini tidak dilakukan oleh aparatur desa maka memungkinkan terjadinya asimetri informasi (kesenjangan informasi) antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga celah untuk melakukan kecurangan dapat terjadi. Dengan demikian akan terjadi konflik kepentingan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Kompensasi yang diterima oleh aparatur desa sudah sesuai dan aparatur desa merasa puas dengan jumlah nominal yang diterima. Namun, dalam proses penerimaan gaji dan tunjangan terkadang masih mengalami keterlambatan. Penerimaan gaji dan tunjangan yang terlambat akan menyebabkan aparatur desa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memungkinkan kinerja aparatur desa tidak maksimal. Selain itu, terkadang sistem yang digunakan oleh aparatur desa mengalami *error*. Sistem yang *error* ini akan menyebabkan terkendalanya proses administrasi di desa.

Sebaiknya pemerintah desa yang belum membuat infografis Laporan APBDes supaya bisa membuatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana Desa kepada masyarakat setempat. Pemerintah pusat juga sebaiknya dapat meninjau kembali terkait mekanisme pembayaran tunjangan baik itu tunjangan jabatan maupun uang makan, karena selama ini tunjangan yang diterima oleh aparatur desa masih dirapel 4 bulan sekali. Dalam penelitian ini juga masih terdapat keterbatasan penelitian salah satunya adalah variabel yang diteliti yaitu asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah variabel yang lain yang memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan seperti variabel budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, dan kolusi.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the nations*.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Aswad, H., Hasan, A., & Indrawati, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Keefektifan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 221–234.
- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Azhar, A. (2021). Determinants of Fraud in the Village Government: The Pentagon's Fraud Perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173–187. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.21037>
- Buku Pintar Dana Desa. (2019). In *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Dunk, A. S. (1993). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack. *JSTOR*, 68(2), 400–410.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*, "Academy of Management Review", vol. 14, no. 1.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law & Economics*, XXVI. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94032>
- Firnanda, R., Fariz, M., Pangestu, L. P., Umar, H., & Trisakti, U. (2019). Kajian Firnanda. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1–7. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/5779/4531>
- Gigih, H., Nurna, P., & Noris. (2023). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak Faktor Individu dan GCG. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(2), 13–24. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i2.529>

- Handi, A., Raharjo, I. B., & . W. (2021). Determinan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v1i1.10810>
- Harahap, J. P. R., Hebra, M. D., & Yulandari. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Harsat, Y., Dara, A., & Hormati, A. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Integritas , dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada SKPD Kota Ternate. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/jtrans.v10i2.6243>
- ICW. (2023, February). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. *Indonesia Corruption Watch*.
- Indah, L. N., Imtikhanah, S., Andayani, T. D., & Rachmani, F. A. (2022). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Kendal). *Neraca*, 17(2), 1–13. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i2.628>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structur. *Journal of Financial Economic*, 3.
- Kemenkeu. (2024, March). Kementrian Keuangan. *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*.
- Rifki, M. (2023, June). PJ Kepala Desa di Kukar Korupsi Rp 1 Miliar Lebih, Palsukan Dokumen Hingga Stampel. *Klik Kaltim Satu Kali Klik Sejuta Informasi*.
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218–236. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4117>
- Safitri, W., Wening, N., & Respati, T. (2023). Factors Influencing Accounting Fraud in Village Fund Management in South Kalimantan. *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 155–164. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i3.68933>
- Samanto, H., & Setyaningsih, N. (2020). Pengaruh Pengendalian Intern , Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, November 2020*, 43–55.
- Sari, F. S., & Kamayanti, A. (2021). Prevention of Accounting Fraud in the Village Government. *Proceedings of 2nd Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2020)*, 183(Ambec 2020), 185–190. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210717.038>
- Sari, S. P., Defitri, S. Y., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Moralitas Individu dan Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 281–301.
- Setiawan, M. D., Adiputra, I. M. P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Asimetri Informasi , dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat SeKabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) UNDIKSHA*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5223>
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntasi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8003>
- Sudariani, N. M. R., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12, pp.830–841.
- Suwarianti, N. N., & Sumadi, N. K. (2020). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 710–738. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.796>

- Wahyudi, A. (2020). The Effect of Asymmetric Information and Unethical Behaviour towards Tendency of Accounting Fraud in the Rural Government of Empang Sub-District, Sumbawa Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(12), 584–589.
- Wilopo. (2006). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Wright, P., Mukherji, A., & Kroll, M. J. (2001). A reexamination of agency theory assumptions: Extensions and extrapolations. *Journal of Socio-Economics*, 30(5), 413–429. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(01\)0012-0](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(01)0012-0)